

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konflik bersenjata merupakan salah satu fenomena yang memiliki dampak besar terhadap keamanan manusia, terutama terhadap kelompok masyarakat yang rentan seperti perempuan dan anak-anak. Dalam berbagai konflik modern, anak-anak tidak hanya menjadi korban tidak langsung dari kekerasan bersenjata, tetapi juga terlibat secara langsung dalam aktivitas tersebut. Pada konflik bersenjata di Yaman, kondisi ini berakar pada krisis politik dan keamanan yang telah berkembang selama bertahun-tahun, dimana bentrokan antara pemerintah dan Houthi sudah terjadi sejak tahun 2004-2010. Kelompok Houthi atau Ansar Allah adalah gerakan yang berkembang dari rasa ketidakpuasan terhadap marginalisasi politik, dan ekonomi, lalu terlibat dalam serangkaian pemberontakan. Situasi kemudian memburuk ketika Houthi mengambil alih ibu kota Sana'a pada tahun 2014 dan mengubah krisis politik menjadi perang yang berkepanjangan. Setelah pengambilalihan tersebut, Houthi mulai merekrut anak-anak untuk terlibat dalam konflik sebagai kombatan dan peran pendukung lainnya dikarenakan keterbatasan sumber daya (Nadila, 2024). Perekrutan tersebut merupakan pelanggaran serius yang akhirnya memperburuk krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di Yaman.

Anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata sering disebut sebagai tentara anak. Sebanyak 22 pemerintah dan 110 aktor non-negara yang terlibat konflik tercatat terlibat dalam perekrutan tentara anak. Sekitar 337 juta anak di dunia hidup di wilayah konflik yang berkaitan dengan beresiko perekrutan anak. Selama tahun 2018 hingga 2021, Yaman bersama dengan Afghanistan dan Suriah termasuk ke dalam kelompok negara dengan tingkat risiko tertinggi, dengan persentase 90% anak berada dalam risiko direkrut ke dalam konflik bersenjata (Haer, 2021). Mulai dari anak laki-laki hingga perempuan, semuanya mengalami berbagai bentuk

eksploitasi dan kekerasan yang jauh lebih luas daripada sebutan mereka. Pihak-pihak yang berkonflik menggunakan anak-anak tidak hanya sebagai kombatan, tetapi juga sebagai pengintai, juru masak, pengangkut barang, hingga berbagai peran lainnya. Tidak sedikit dari mereka, terutama anak perempuan, menjadi korban kekerasan berbasis gender.

Perekrutan tentara anak di Yaman menjadi bukti bahwa ini merupakan isu keamanan manusia, perlindungan anak, dan diplomasi perdamaian, bukan hanya sebagai isu pelanggaran hukum humaniter internasional saja. Tingginya angka perekrutan tentara anak di Yaman menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap sipil. Laporan dari Kementrian HAM Pemerintah Yaman, sejak tahun 2014 hingga 2021, menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 30.000 anak telah menjadi korban perekrutan tentara anak (Euro-Med Human Rights Monitor, 2021). Padahal, Yaman sendiri telah memiliki komitmen internasional mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata semenjak meratifikasi *Optional Protocol to the Convention on the Involvement of Children in Armed Conflict* (OPAC) pada tahun 2007. Berdasarkan ratifikasi tersebut, Yaman memiliki kewajiban untuk mencegah perekrutan dan melindungi anak di bawah usia 18 tahun secara khusus dalam situasi konflik. Komitmen ini diperkuat pada tahun 2014 bersama PBB melalui penandatanganan *Action of Plan to End and Prevent the Recruitment and Use of Children by the Yemeni Armed Forces*. Meskipun dokumen ini bertujuan untuk mengakhiri dan mencegah praktik perekrutan anak melalui langkah-langkah yang lebih sistematis, praktik tentara anak di Yaman masih tetap berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan formal saja tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan tentara anak di Yaman karena adanya kesenjangan antara komitmen normatif dan pelaksanaannya di lapangan.

Rentang 2018-2021 merupakan periode yang penting untuk dianalisis karena pada fase ini Yaman berada di antara harapan perdamaian dan kenyataan eskalasi kekerasan.

Tabel 1 *Dinamika Konflik di Yaman*

Tahun	Dinamika Konflik
2018	Pada Desember tahun 2018, Perjanjian Stockholm dibuat antara pemerintah Yaman dan Houthi menghasilkan komitmen gencatan senjata di Hudaydah, penempatan ulang pasukan, dan langkah-langkah pembangunan kepercayaan, namun laporan Sekretaris Jenderal PBB tentang anak dan konflik bersenjata di Yaman menjelaskan bahwa pertempuran di wilayah lain tetap berlanjut tanpa henti walaupun sudah ada perjanjian tersebut (United Nations, 2021).
2019	Pada November 2019, Persetujuan Riyadh muncul dikarenakan Perjanjian Stockholm dianggap gagal mencapai hasil yang efektif dan memiliki dampak yang terbatas, selain itu konflik juga semakin menjadi secara politik dan militer di bagian selatan (Arif, 2019).
2020	Pada 2020, harapan bahwa perjanjian Stockholm dan perjanjian Riyadh akan menjadi batu loncatan mulai terlihat makin lemah. Justru pada 2020, medan tempur makin melebar. UNICEF mencatat bahwa selama tahun itu jumlah wilayah pertempuran aktif meningkat dari 35 menjadi 49 (UNICEF, 2020).
2021	Pada 2021, OHCHR menyatakan konflik Yaman memasuki tahun ketujuh dengan kurangnya kemauan politik yang tak tertahankan untuk penyelesaian damai (OHCHR, 2021).

Sumber: Penulis merangkum dari beberapa sumber

Perekrutan tentara anak yang berkelanjutan tidak dapat dilihat dari segi militer saja, karena pendorong utamanya justru berasal dari krisis sosial-ekonomi dan kehancuran institusi sipil yang terjadi selama konflik berlangsung. Laporan PBB 2021 menegaskan bahwa kemiskinan, pengangguran, keterbatasan akses pendidikan, pelatihan vokasional, dan peluang penghidupan merupakan faktor-faktor pendorong utama terjadinya perekrutan tentara anak di Yaman. Kebanyakan anak bergabung dengan kelompok bersenjata dikarenakan itu menjadi satu-satunya sumber pendapatan keluarga. OHCHR menyoroti pola perekrutan tentara anak, terutama yang dilakukan oleh Houthi, dan mencatat bahwa lebih dari dua juta anak di Yaman tidak bersekolah (OHCHR, 2021). Laporan Sekretaris Jenderal juga membenarkan adanya penggunaan 80 sekolah untuk tujuan militer pada tahun 2019-2020. Sekolah-sekolah kerap digunakan untuk propaganda maupun rekrutmen.

Krisis berkepanjangan yang berlangsung di Yaman telah memberikan dampak yang sangat menghancurkan bagi seluruh rakyat Yaman, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak. Ketidakmampuan pemerintah Yaman dalam menangani konflik sendiri dan memastikan keamanan anak-anak dikarenakan konflik yang berlangsung. Sebagai respon terhadap situasi ini, *Multi-Track Diplomacy* dilakukan oleh pemerintah Yaman dengan tujuan untuk mencegah perekrutan tentara anak dan pemulihan kembali anak-anak yang terlibat dalam konflik. Selain itu juga berfokus pada penanganan masalah tentara anak yang dipicu oleh kerusakan sosial dan ekonomi akibat perang. Dalam konteks ini, International Labour Organization (ILO) menyebut tentara anak sebagai bentuk terburuk dari pekerja anak. Rusaknya kondisi sosial dan ekonomi, juga kurangnya akses pendidikan memaksa anak-anak terlibat dalam konflik bersenjata di Yaman (International Labour Organization, 2021).

Penulis menggunakan beberapa literatur dalam penelitian ini. Penelitian pertama berjudul “Analisis Hukum Humaniter Internasional pada Penggunaan Tentara Anak dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional di Yaman” yang ditulis oleh Naura Hafiza Ainayyah,

Joko Setiyono, dan H. M. Kabul Supriyadhie (2020). Dalam penelitian ini, penulis fokus menjelaskan bahwa perekrutan dan penggunaan anak-anak di bawah umur sebagai tentara anak yang dilakukan baik oleh pemerintah Yaman maupun Houthi merupakan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional. Pelanggaran ini bertentangan dengan ketentuan dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan II 1997 Pasal 4 angka 2 huruf c, Konvensi Hak Anak 1989 Pasal 38, serta Protokol Pilihan 2000 Pasal 1 dan 2. Larangan mengenai penggunaan tentara anak juga ditegaskan dalam Konvensi ILO 182 Pasal 3 huruf a. Berdasarkan Statuta Roma 1998 Pasal 8 angka 2 huruf b nomor XXVI dan huruf e nomor VII juga mengkategorikan penggunaan anak dalam konflik bersenjata sebagai kejahatan perang. Penulis menjelaskan bahwa pemerintah Yaman telah memenuhi kewajiban dalam Konvensi Jenewa 1949 dengan menerbitkan hukum nasional seperti The Military Penal Code dan Law No. 21 of 1998, namun hingga saat ini, pemerintah Yaman masih belum mengadili para pelaku kejahatan perang tersebut (Ainayyah, 2020).

Penelitian kedua berjudul “Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) terhadap Penanganan Kasus Tentara Anak di Yaman” yang ditulis oleh Putri Nurul Reza (2022). Penelitian ini berfokus pada bagaimana konflik bersenjata yang terjadi di Yaman telah menimbulkan banyak pelanggaran terhadap hak anak-anak yang seharusnya dilindungi oleh negara. Kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, terbatasnya pangan yang menyebabkan malnutrisi, kondisi sanitasi dan air bersih yang buruk, rusaknya sistem pendidikan, hingga meningkatnya angka eksploitasi anak merupakan bentuk-bentuk dari pelanggaran yang terjadi selama masa perang. Penulis menjelaskan bahwa Yaman telah melakukan upaya untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak yang telah dilanggar selama konflik berlangsung. Pemerintah Yaman juga telah melakukan pengesahan Undang-Undang Hak Anak No. 45 tahun 2002 yang dirancang khusus agar sesuai dengan hukum internasional dan domestik. Selain itu, pemerintah Yaman juga meluncurkan beberapa program yang bertujuan untuk pemenuhan hak-

hak anak yang selama ini telah terabaikan. Beberapa aktor seperti UNICEF, WHO, dan WFP turut memberikan bantuan, namun pada pelaksanaannya terdapat hambatan eksternal dan internal yang menghambat pendistribusian bantuan (Reza, 2023).

Penelitian ketiga berjudul “Peran International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam Meminimalisir Perekrutan Tentara Anak pada Konflik Bersenjata di Yaman” yang ditulis oleh Maria Ulfa Fitriah, Syaiful Anam, dan Valencia Husni (2023). Penulis bahwa konflik bersenjata di Yaman telah sedari awal telah memberikan dampak signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan, hingga menjadikan Yaman sebagai salah satu negara dengan krisis kemanusiaan terparah di dunia. Dari kondisi ekonomi, pendidikan yang terbatas, faktor sosial budaya, dan indoktrinasi kelompok bersenjata, akhirnya memicu pada terjadinya perekrutan anak-anak sebagai tentara. Dalam hal ini, ICRC berusaha membantu anak-anak kembali berintegrasi dengan keluarga serta mendapatkan hak mereka sebagai warga sipil. Namun, peran ICRC masih terbatas dikarenakan tidak memiliki mandat khusus untuk menangani langsung masalah perekrutan anak, meskipun hal ini telah diatur dalam Konvensi Hukum Humaniter Internasional dan protokolnya (Fitriah, 2023).

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah penulis jelaskan di atas, terdapat *research gap* dalam penerapan diplomasi yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Analisis *Multi-Track Diplomacy* Yaman dengan Arab Saudi dalam Penanganan Tentara Anak di Yaman tahun 2018-2021”. Penelitian ini akan berfokus untuk menganalisis peran aktor non negara lainnya dan bagaimana sinergi antar *track* diplomasi dalam bekerja sama menangani masalah tentara anak di Yaman.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana strategi *Multi-Track Diplomacy* Yaman dalam penanganan tentara anak di Yaman pada tahun 2018-2021?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Secara Umum

Dalam menulis setiap penelitian, penulis tentunya memiliki tujuan utama yang ingin dicapai. Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh penulis selama masa studi perkuliahan, khususnya di bidang Hubungan Internasional, baik untuk masyarakat umum maupun kalangan akademisi, terutama untuk keperluan karya ilmiah yang berkaitan dengan Ilmu Hubungan Internasional. Penulisan ini juga merupakan syarat untuk memperoleh gelar S1 pada program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan Secara Khusus

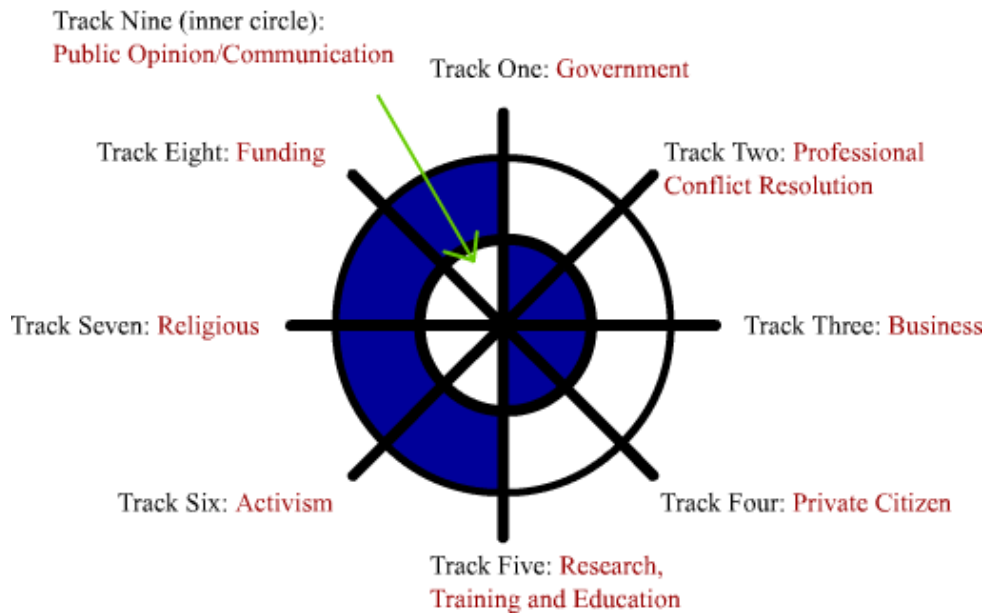
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan tentang penerapan *Multi-Track Diplomacy* Yaman dengan Arab Saudi dalam penanganan masalah tentara anak di Yaman antara tahun 2018-2021. Konflik bersenjata di Yaman telah berlangsung sejak tahun 2014 dan melibatkan berbagai pihak, termasuk aktor negara dan non negara, dalam perekrutan dan penggunaan anak-anak dalam konflik. Munculnya aktor non negara seperti organisasi kemanusiaan, PBB, dan komunitas internasional lainnya dalam upaya menyelesaikan masalah ini menjadi bagian yang penting untuk diteliti lebih dalam. Penulis berpendapat bahwa aktor-aktor non negara juga memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik dengan memberikan dampak langsung terhadap perlindungan anak melalui bantuan kemanusiaan, advokasi, dan upaya reintegrasi anak-anak bekas tentara ke dalam masyarakat.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Multi-Track Diplomacy

Multi-Track Diplomacy adalah pendekatan diplomasi yang memandang proses perdamaian bukan hanya sekedar urusan pemerintah, tetapi juga merupakan sebuah sistem

yang melibatkan banyak aktor yang saling terhubung (McDonald & Diamond, 2003). Gagasan ini berkembang dari konsep *Track 1* (pemerintah) dan *Track 2* (kalangan profesional non pemerintah) yang sudah lebih dahulu diperkenalkan oleh Joseph Montville pada tahun 1982, kemudian pada tahun 1989, diperluas oleh John W. McDonald menjadi lima jalur diplomasi. Pada tahun 1991, John W. McDonald bersama dengan Louise Diamond memperluas lima jalur menjadi sembilan jalur diplomasi dan menamai kerangka tersebut sebagai *Multi-Track Diplomacy*. Konsep ini menolak anggapan bahwa konflik bisa diselesaikan bahwa konflik bisa diselesaikan hanya melalui dialog resmi antar pemerintah. Perdamaian yang tahan lama tidak cukup dibangun dengan perjanjian politik saja, tetapi juga harus didukung oleh perubahan pada bidang sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, agama, komunikasi, dan dukungan sumber daya. *Multi-Track Diplomacy* digambarkan sebagai *systems approach to peace*, yaitu pendekatan sistemik terhadap perdamaian, dimana semua jalur bekerja saling melengkapi. Tidak ada satu jalur yang dianggap lebih tinggi, semua memiliki fungsi, nilai, dan cara kerja yang berbeda, tetapi baru efektif apabila terhubung satu sama lain. Diamond dan McDonald menambahkan bahwa dalam *Multi Track Diplomacy*, aktor diplomasi tidak harus selalu berasal dari luar negeri atau lembaga internasional. Diplomasi tidak hanya dilakukan oleh negara melalui jalur resmi pemerintah, tetapi juga dapat dilakukan oleh berbagai aktor dari dalam negeri, seperti masyarakat sipil, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, media, pelaku bisnis, akademisi, komunitas lokal, hingga NGO nasional. Hal ini karena *Multi Track Diplomacy* melihat perdamaian sebagai proses yang melibatkan banyak lapisan masyarakat. Aktor domestik justru memiliki peran penting karena mereka lebih dekat dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan konflik yang terjadi di masyarakat. Mereka memahami kebutuhan masyarakat secara langsung, sehingga dapat membangun kepercayaan dan memperkuat komunikasi antar kelompok (McDonald & Diamond, 2003).



Gambar 1.1 Multi-Track Diplomacy

Sumber: John W. McDonald dan Louise Diamond, 2003

Pada *Track 1* (pemerintah) mencakup jalur diplomasi resmi, seperti negosiasi formal, perumusan kebijakan, perjanjian perdamaian, diplomasi antar negara, dan penggunaan institusi resmi pemerintahan untuk mengelola konflik. *Track* ini menentukan keputusan formal yang mengikat, misalnya pembentukan kerangka hukum perdamaian, pengakuan politik, atau gencatan senjata. Namun, jalur ini bukan satu-satunya penyelesaian konflik karena keputusan pemerintah seringkali membutuhkan dukungan sosial yang lebih luas agar dapat benar-benar dijalankan. Contoh aktor dalam *track 1* antara lain adalah diplomat resmi, militer, organisasi antar pemerintah seperti PBB, UNESCO, NATO, dan World Bank.

Track 2 (kalangan profesional non pemerintah) adalah jalur yang diisi oleh mediator, fasilitator dialog, lembaga resolusi konflik, pakar negosiasi, dan aktor profesional lain yang bekerja di luar struktur negara. Contoh aktor pada *track 2* ini adalah Doctors Without Borders (MSF), the Red Cross, dan organisasi internasional lainnya yang bersifat netral dalam konflik. Fungsi utamanya adalah menganalisis dan membantu menyelesaikan konflik melalui

pendekatan profesional yang lebih fleksibel daripada jalur diplomasi resmi. *Track* ini penting karena sering kali dapat membuka komunikasi ketika jalur pemerintah mengalami kendala. Dalam praktiknya, *track* ini berperan menciptakan ruang aman untuk dialog, membangun kepercayaan awal, dan menguji gagasan kompromi sebelum masuk ke meja perundingan formal. Namun, tantangan terbesar dalam *track* ini adalah uang. Lembaga donor umumnya meminta hasil yang cepat, sedangkan para praktisi resolusi konflik membutuhkan proses jangka panjang untuk membangun kepercayaan hingga terciptanya perdamaian yang berkelanjutan.

Track 3 (bisnis) adalah jalur perdamaian melalui perdagangan dan kegiatan ekonomi. *Track* ini ditempatkan sebagai aktor penting karena sektor ekonomi dapat menciptakan insentif perdamaian melalui peluang kerja, investasi, hubungan dagang, serta kepentingan bersama untuk menjaga stabilitas. Komunitas bisnis tradisional berorientasi pada keuntungan, namun belakangan ini, komunitas bisnis mulai menyadari bahwa kegiatan perdamaian dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan aman bagi para karyawannya. Bisnis dapat membantu menurunkan ketegangan akibat konflik yang berkepanjangan, dimana pasar, distribusi, dan investasi biasanya mengalami kerusakan.

Track 4 (warga sipil) adalah jalur dimana individu terlibat secara langsung dalam kegiatan perdamaian dan pembangunan. Hal ini mencakup *citizen diplomacy*, kegiatan organisasi sukarela, program pertukaran, NGO, komunitas lokal, dan kelompok kepentingan tertentu. Diamond dan McDonald menekankan bahwa warga sipil tidak pasif dalam proses diplomasi, mereka juga bisa membangun jembatan antar kelompok dan menciptakan hubungan lintas batas. Individu-individu ini memiliki pengetahuan luas mengenai apa yang terjadi di lapangan, meskipun mereka sering kesulitan menjalin hubungan dengan *track* lainnya. Namun pada tingkat inilah perdamaian sering memperoleh fondasi sosialnya, karena perubahan sikap masyarakat tidak selalu bisa dipaksakan dari atas oleh pemerintah.

Track 5 (riset, pelatihan, dan pendidikan) adalah jalur perdamaian melalui pembelajaran. *Track* ini mencakup penelitian dari universitas dan pusat studi, pelatihan keterampilan praktis seperti negosiasi, mediasi, resolusi konflik, serta pendidikan formal dari tingkat dasar sampai doktoral yang mengajarkan studi perdamaian, analisa konflik, dan studi lintas budaya. Pengetahuan, konsep, data, metode, dan keterampilan merupakan peran dari *track* ini yang akan dibutuhkan oleh *track-track* yang lainnya. Tanpa riset dan pendidikan, perdamaian mudah saja terjadi sebagai slogan, namun tanpa adanya dasar intelektual yang akan menopangnya.

Track 6 (aktivisme) merupakan jalur perdamaian melalui advokasi. *Track* ini mencakup aktivisme perdamaian, lingkungan, hak asasi manusia, keadilan sosial dan ekonomi, serta advokasi kebijakan tertentu. Aktivis berperan menyuarakan agar isu-isu ketidakadilan yang menjadi akar konflik tidak diabaikan oleh negara maupun masyarakat. Aktivis memiliki peran yang penting dalam mendorong kesadaran publik, menekan elite politik, mengangkat suara kelompok rentan, dan menuntut perubahan kebijakan. Dalam *Multi-Track Diplomacy*, aktivisme sendiri tidak hanya sekadar mengenai protes, tetapi juga berusaha agar proses perdamaian lebih adil dan tidak hanya menguntungkan pihak yang kuat saja. Aktor di *track* ini biasanya berfokus pada satu topik terkait keadilan dan hak asasi manusia, seperti Amnesty Internasional dan Human Rights Watch.

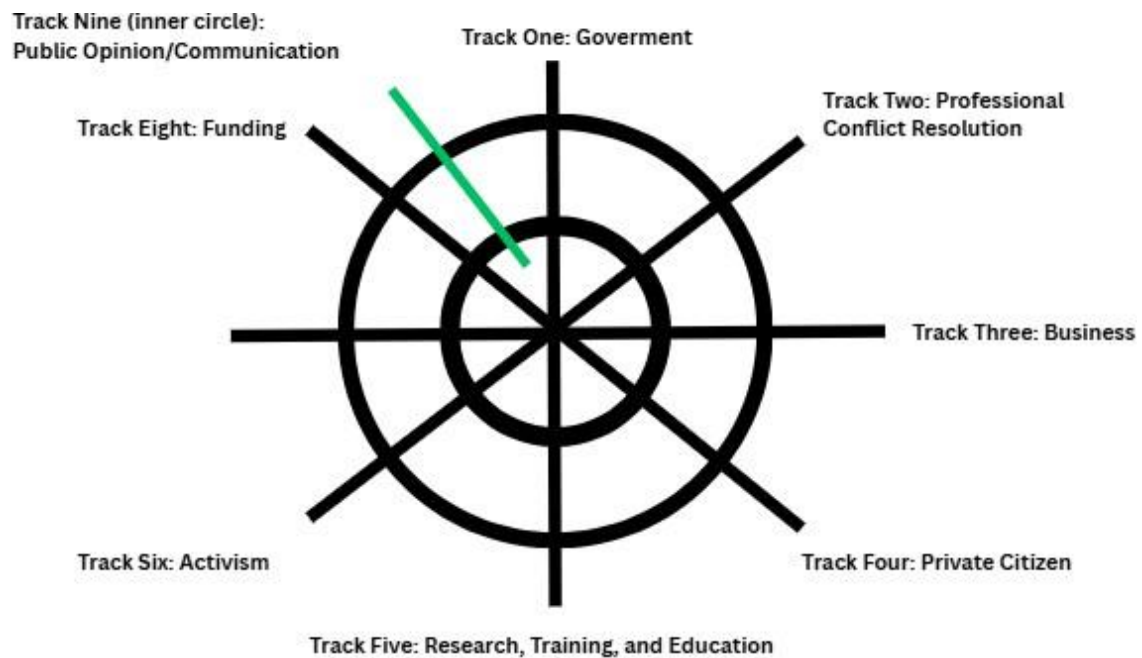
Track 7 (agama) berfokus pada jalur perdamaian melalui tindakan keimanan dan moral. Komunitas spiritual dan keagamaan memiliki pengaruh besar terhadap nilai, identitas, legitimasi moral, dan perilaku masyarakat. *Track* ini mencakup kontribusi tokoh agama, gerakan moral seperti non kekerasan, perdamaian, perlindungan terhadap korban, dan rekonsiliasi. *Track* ini penting dikarenakan dalam beberapa konflik tidak hanya bersifat politik, tetapi juga mencakup keyakinan.

Track 8 (pendanaan) adalah jalur penyediaan sumber daya. *Track* ini berfokus pada lembaga pendukung yang membiayai kegiatan-kegiatan dari *track* lain, seperti yayasan dan donor individu. Dalam *Multi-Track Diplomacy*, pendanaan tidak dianggap sebagai unsur tambahan semata, melainkan komponen struktural dalam sistem perdamaian. Hal ini dikarenakan, dialog, pelatihan, riset, kampanye advokasi, dan program media tidak akan berkelanjutan tanpa bantuan finansial. Maka dari itu, pendanaan ini sendiri bukan hanya sekadar “penopang di belakang layar”, melainkan aktor yang ikut menentukan proses damai akan bisa bertahan, meluas, dan menjangkau kelompok yang membutuhkan, atau malah tidak sama sekali. Namun, yang menjadi penghalang adalah banyak lembaga pendanaan hanya memberikan waktu 2-3 tahun untuk mendapatkan hasil akhir, padahal waktu ini bisa jadi terlalu singkat dalam banyak proses di lapangan.

Track 9 (komunikasi dan media) merupakan jalur perdamaian melalui informasi. *Track* ini merupakan ranah suara rakyat, tentang bagaimana opini publik dibentuk dan diungkap melalui media cetak, film, radio, sistem elektronik, dan seni. Menurut Diamond dan McDonald, masalah dari *track* ini adalah media lebih menyukai “berita buruk” daripada “berita baik”. Masalah lainnya juga dimana ketika media meliput sebuah peristiwa, maka peristiwa tersebut ada. Sedangkan jika tidak, maka peristiwa tersebut dianggap tidak ada.

Pada penelitian ini, penulis tidak akan menggunakan *track 7* karena tidak ditemukan keterlibatan aktor atau lembaga keagamaan dalam studi kasus, sehingga *track 7* tidak dianggap relevan dalam konteks penelitian ini.

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 2.1 Sintesa Pemikiran

Sumber: Penulis, 2026

Multi-track Diplomacy memandang perdamaian sebagai hasil kerja dari berbagai jalur yang saling terhubung dalam sebuah *systems approach to peace*. Penelitian difokuskan pada beberapa *track* yang paling relevan dengan studi kasus, dikarenakan tidak semua *track* muncul secara signifikan, sehingga analisis akan difokuskan pada *track* yang terlihat keterlibatannya serta didukung oleh ketersediaan data penelitian. Analisis difokuskan pada *track* 1 (pemerintah), *track* 2 (kalangan profesional non pemerintah), *track* 4 (warga sipil), *track* 5 (riset, pelatihan, dan pendidikan), *track* 6 (aktivisme), *track* 8 (pendanaan), *track* 9 (komunikasi dan media). Pembatasan ini dilakukan bukan untuk mengubah atau menyederhanakan konsep asli *Multi-track Diplomacy*, melainkan agar analisis tetap terarah dan sesuai dengan fokus penelitian.

1.6 Argumentasi Utama

Penanganan masalah tentara anak di Yaman antara tahun 2018-2021 memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan melibatkan berbagai aktor, sehingga *Multi-Track*

Diplomacy berperan krusial sebagai kerangka konsep yang dapat mengakomodasi kompleksitas konflik dan keterlibatan anak-anak dalam perang. Aktor-aktor yang dapat dipetakan ke dalam kerangka Multi-Track Diplomacy meliputi *track 1* (pemerintah) yang diwakili oleh Pemerintah Yaman dan Pemerintah Arab Saudi dalam diplomatik resmi untuk menangani perekrutan tentara anak; *track 2* (kalangan profesional non pemerintah) terdiri dari UNICEF, ILO, World Bank, dan UNDP yang merancang berbagai kegiatan dalam upaya pemulihan mantan tentara anak dan perlindungan anak dari rekrutmen paksa; *track 3* berisi bank lokal yang mendukung pemulihan ekonomi tentara anak, *track 4* (warga sipil) berisi keterlibatan pendiri Mwatana for Human Rights yang mendokumentasikan pelanggaran HAM pada tentara anak; *track 5* (riset, pelatihan, dan pendidikan) diwujudkan melalui kontribusi UNU-CPR dan SIPRI dalam melakukan riset berbasis kelompok terdampak konflik, kesehatan, dan pendidikan; *track 6* (aktivisme) berisi Mwatana for Human Rights, Human Rights Watch, dan Amnesty International yang menyoroti kelompok NGO internasional yang mendesak investigasi pelanggaran HAM dan hukum humaniter di Yaman; *track 8* (pendanaan) diisi oleh KSRelief sebagai donor dalam program rehabilitasi anak dan USDRL dalam program CRUCSY; terakhir *track 9* (komunikasi dan media) melalui website Al Jazeera dan Associated Press yang turut memberitakan rusaknya layanan sosial dan jutaan hidup anak yang terancam di Yaman.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena secara sistematis berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan maupun dari berbagai sumber yang relevan. Menurut (Sugiyono, 2013), penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa harus mengambil sampel. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu

untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana pendekatan *Multi-Track Diplomacy* dijalankan dalam upaya penanganan masalah tentara anak di Yaman pada tahun 2018-2021.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan jangkauan waktu pada tahun 2018 hingga 2021, yaitu periode ketika isu tentara anak di Yaman mencapai tahap harapan dengan munculnya perjanjian Stockholm dan Perjanjian Riyadh, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa persentase anak berada dalam risiko direkrut ke dalam konflik bersenjata di Yaman mencapai angka 90%.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Dalam penelitian ini, dokumen seperti laporan organisasi internasional, publikasi lembaga kemanusiaan, jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, berita, dan sumber daring lainnya yang relevan dengan topik penelitian akan digunakan untuk memperoleh data yang memadai. Kemudian, penulis akan berupaya untuk menganalisa data-data tersebut untuk mendeskripsikan secara komprehensif upaya dari berbagai aktor dalam menangani masalah tentara anak di Yaman pada periode 2018-2021.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini. Menurut (Sugiyono, 2013), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami aktivitas, fenomena, dan proses sosial yang terjadi dalam suatu lingkungan tertentu. Teknik dalam penelitian ini digunakan untuk memahami penanganan tentara anak di Yaman sebagai suatu kasus yang kompleks, dimana melibatkan berbagai aktor dan kepentingan yang saling berinteraksi. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana *Multi-Track Diplomacy* bekerja dalam konteks konflik bersenjata di Yaman, khususnya melalui peran pemerintah, organisasi internasional, lembaga non pemerintah, tokoh masyarakat, media, dan aktor lain yang terlibat dalam upaya penanganan tentara anak. Hasil analisis akan disajikan secara naratif deskriptif

sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai dinamika penanganan isu tentara anak di Yaman selama tahun 2018-2021.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, konsep yang mendasari penelitian, sintesis pemikiran, argumen utama, metodologi penelitian, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II. Analisis *Multi-Track Diplomacy* dalam Penanganan Tentara anak di Yaman (*track* 1, 2, 4)

Bab II berisi analisis penerapan *Multi-Track Diplomacy* dalam penanganan tentara anak di Yaman melalui *track* 1 (pemerintah), *track* 2 (kalangan profesional non pemerintah), *track* 4 (warga sipil); serta menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan *Multi-Track Diplomacy* seperti akses kemanusiaan, koordinasi antar aktor, dan hambatan politik.

Bab III. Analisis *Multi-Track Diplomacy* dalam Penanganan Tentara anak di Yaman (*track* 5, 6, 8, 9)

Bab III berisi analisis penerapan *Multi-Track Diplomacy* dalam penanganan tentara anak di Yaman melalui *track* 5 (riset, pelatihan, dan pendidikan), *track* 6 (aktivisme), *track* 8 (pendanaan), *track* 9 (komunikasi dan media); serta menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan *Multi-Track Diplomacy* seperti akses kemanusiaan, koordinasi antar aktor, dan hambatan politik.

Bab IV. Penutup

Bab IV menyajikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.